



APBN Wilayah Sumsel Mendorong Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Palembang, 14 Agustus 2024 – Kinerja pelaksanaan APBN Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) terus menunjukkan tren positif hingga 31 Juli 2024. Hal ini ditunjukkan melalui kinerja realisasi pendapatan dan belanja negara yang tetap tumbuh positif. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi dari penerimaan tahun lalu. Belanja negara juga menunjukkan kinerja yang optimal yang ditunjukkan melalui realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang lebih tinggi dari tahun lalu.

Aktivitas perekonomian di Sumsel dalam tren yang positif. Hal ini ditunjukkan melalui tingkat inflasi. Inflasi per Juli 2024 tercatat sebesar 1,87% (yoy) yang berada di bawah rata-rata inflasi nasional sebesar 2,13% (yoy). Neraca perdagangan bulan Juli 2024 surplus sebesar USD387,72 juta yang secara kumulatif hingga Juli 2024, surplus neraca perdagangan di Sumsel mencapai USD2,24 miliar.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wilayah Sumsel hingga 31 Juli 2024 menunjukkan tren positif. realisasi pendapatan negara sebesar Rp10.812,34 miliar atau terealisasi sebesar 48,85%. Pendapatan tersebut terdiri dari pajak sebesar Rp8.925,57 miliar atau terealisasi sebesar 45,70%, kepabeanan dan cukai sebesar Rp169,11miliar atau terealisasi sebesar 44,64%, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1.717,66 miliar atau terealisasi 77,20%.

Sementara itu, dari sisi belanja negara terealisasi sebesar Rp26.378,36 miliar atau terealisasi sebesar 49,89% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp9.584,12 miliar



atau terealisasi 45,20%, dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp16.794,23 miliar atau terealisasi sebesar 53,02%. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp22,19 triliun atau terealisasi 49,89% dari target, dan belanja daerah tercatat sebesar Rp19,36 triliun atau 42,53% dari pagu. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Wilayah Sumsel menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi pendapatan dari dana transfer dan realisasi seluruh jenis belanja daerah merupakan faktor pendorong pertumbuhan kinerja APBD tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rahmadi Murwanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumsel mewakili seluruh Kepala Kanwil Kemenkeu di Sumatera Selatan dalam rapat pleno Forum *Asset and Liability Committee* (ALCo) Sumsel yang beranggotakan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan.

Dari sisi Pendapatan negara, penerimaan pajak mencapai 45,70% dari target APBN, dengan pertumbuhan netto sebesar 5,1%, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran PPN DN dan PPh Final atas kegiatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pembayaran PPh 21 di seluruh sektor yang menjadi indikator baiknya level penghasilan karyawan. Hal ini terutama terlihat dari pertumbuhan PPh Non Migas tumbuh positif sebesar 6,3% dan pertumbuhan PPN & PPnBM tumbuh positif sebesar 0,9%. Hal ini menunjukkan resiliensi yang baik pada aktivitas ekonomi di wilayah Sumsel. Realisasi penerimaan bea masuk mengalami peningkatan 31,66% (yoy) disebabkan adanya peningkatan importasi beras, bahan baku karet, dan mesin yang membukukan realisasi sebesar Rp104,41 miliar atau tercapai 51,58%. Komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar sampai dengan Juli 2024 didominasi dari produk CPO yang mencapai Rp29,32 miliar (59% dari total bea keluar). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja positif, terdiri dari pendapatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,14 triliun, pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp574,66 miliar, termasuk PNBP aset, piutang, dan lelang yang mencapai Rp53,71 miliar.

Belanja negara di wilayah Sumsel sampai dengan 31 Juli 2024 terealisasi sebesar Rp26,37 triliun. Kinerja belanja negara tersebut tumbuh positif sebesar 18,02% (yoy) karena didorong dari sisi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penyaluran TKD yang mengalami peningkatan dan mencatatkan tren positif pada hampir semua jenis TKD. Kinerja Belanja K/L tumbuh positif 27,48% (yoy), belanja ini dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan, kegiatan pemilu tahun 2024, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mahasiswa, dan bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial.

Penyaluran TKD terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 13,23% (yoy), tercatat Rp16,79 triliun atau 53,02% dari pagu telah tersalur (lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama). Faktor pendorong utamanya adalah pertumbuhan kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Desa di Sumsel.

Sebagai kesimpulan, perekonomian Sumsel terjaga positif, inflasi terkendali, dan aktivitas perekonomian masyarakat membaik. APBN Wilayah Sumsel telah bekerja optimal dengan memberikan dorongan positif untuk menjaga stabilitas ekonomi kewilayahan sebagai instrumen pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan negara di wilayah Sumsel sampai dengan bulan Juli 2024 tumbuh secara *year-on-year* dan realisasi belanja negara lebih baik secara *year-on-year*.



Narahubung:

Denny Handoyo Supriatman

Ketua Pokja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik
Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang
Jl. Sukabangun II, Sukarami, Sukajaya, Palembang 30151